

Bantuan Modal Bagi UMKM Lewat Tangerang Emas Masih Terbuka

TANGERANG (IM) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang, Banten, menyebutkan pihaknya masih membuka kesempatan pelaku UMKM mendapatkan modal usaha melalui program Tangerang Emas.

Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi di Tangerang, Banten, Sabtu menuntun persyaratan program Tangerang Emas tidak rumit, sehingga diharapkan UMKM dapat memanfaatkannya dengan optimal.

Menurut dia, hanya dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), nomor induk berusaha (NIB), dan usaha yang dikembangkan minimal telah berjalan selama enam bulan, UMKM dapat memperoleh modal usaha yang diinginkan.

"Sampai saat ini, program Tangerang Emas terus berjalan dan dapat dimanfaatkan

secara optimal oleh masyarakat luas di Kota Tangerang. Persyaratannya juga dirancang tidak berbelit-belit," katanya dalam keterangannya.

Selain itu, program Tangerang Emas akan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu. Harapannya, hal ini dapat memantik kebangkitan perekonomian lokal untuk mendorong kemajuan di Kota Tangerang.

Program Tangerang Emas merupakan bentuk hasil kerja sama dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) sebagai mitra kerja pemerintah.

Pemkot Tangerang sejauh ini telah merealisasikan bantuan usaha tersebut sebesar Rp603 juta.

"Sampai saat ini, program Tangerang Emas telah terbukti berhasil mengembangkan para pelaku usaha dalam jumlah yang cukup banyak, yakni sebanyak 305 pelaku usaha dengan total nominal modal sebesar Rp603 juta," ujarnya. ● **pp**

Selain JLS, Helldy Ingin Pembangunan Jalan Lain di Cilegon Dibiayai APBN

CILEGON (IM) - Selain Jalan Lingkar Selatan (JLS), Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian juga ingin jalan lain di Kota Cilegon dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Keinginan itu disampaikan Helldy ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemppur).

Diketahui, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk memperbaiki JLS.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah pusat akan memperbaiki ruas kanan dan kiri jalan sepanjang 1,5 kilometer. "Kami juga ingin jalan kota lainnya bisa dibangun lewat anggaran pusat," ujar Helldy dikutip dari keterangan resmi yang dirilis oleh Diskominfo Kota Cilegon.

Helldy berharap agar jalan lain ikut diperbaiki menggunakan anggaran dari pemerintah pusat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sebagai contoh, Pemkot Cilegon menganggarkan Rp120 miliar dari APBD untuk beasiswa full sarjana

sebanyak 5 ribu mahasiswa se-Cilegon. "Jadi memang kami datang untuk menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersama disergiskan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian menanggapi Kemppur pada Jumat 9 Juni 2023 lalu.

Ia didampingi sejumlah pejabat Plt Asisten Daerah (Asda) II Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sabri Mahyudi dan Kepala Dinas Kominfo Agus Zulkarnain, Plt Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Heri Suheri, serta beberapa pejabat teknis lainnya.

Sementara itu, Ditjen Bina Marga, Hedy Rahadian menyampaikan, jika pihaknya siap untuk terus mendorong pembangunan di daerah termasuk Kota Cilegon. Bukan saja soal JLS, tapi juga jalan kota bisa diajukan sepanjang secara spesifikasi besar.

"Bisa tinggal nanti koordinasi, dan tentu ada mekanismenya untuk donput dahulu dalam sistem, baru nanti akan dialokasikan jika jadi prioritas dan memenuhi ketentuan," paparnya. ● **pra**

DPRD DIY Desak Masalah Kemiskinan Ekstrem Harus Tuntas 2024

YOGYAKARTA (IM) - DPRD DIY menegaskan kemiskinan ekstrem sudah harus diselesaikan pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianto, agar sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem.

Huda menyebut, kemiskinan di DIY termasuk tinggi yakni mencapai 11,49 persen, yang di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrem sebesar 1,08 persen. Namun, kemiskinan ekstrem di DIY masih di bawah rata-rata nasional.

"Kemiskinan ekstrem alhamdulillah DIY di bawah rata-rata nasional sebesar 1,74 persen. DIY 1,08 persen, paling rendah se-Pulau Jawa. Sedangkan paling tinggi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah," kata Huda, Minggu.

Meski begitu, kemiskinan ekstrem di DIY tetap harus menjadi perhatian. Penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, katanya, berbasis pada tiga langkah.

Pertama yakni penurunan beban dengan program program charity seperti KIP, bansos, BPJS, dan lain sebagainya. Kedua yaitu dengan peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan, dan ketiga dengan meminimalkan kantong kemiskinan.

"Roadmap penurunan angka ini harus sangat serius kita jalankan karena tinggal waktu satu tahun lagi sesuai amanah Inpres," ungkap Huda.

"Kita bersyukur kemiskinan ekstrem di DIY paling rendah di Pulau Jawa dengan presentase 1,08 persen atau setara dengan sekitar 43 ribu

warga. Dengan didorong serius, kita yakin insya Allah 2024 DIY bisa mencapai target nol persen," tambahnya.

Huda menyebut, angka kemiskinan ekstrem tersebut menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah on the track. Jika upaya penanganan kemiskinan ini terus dilakukan dengan konsisten, pihaknya yakin akan ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY dalam beberapa tahun kedepan.

Ia juga menegaskan alokasi anggaran DIY untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini juga perlu ditingkatkan. Terutama untuk kabupaten/kota yang masih mengalokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem di bawah empat persen.

"Program program bisa difokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE yang Pemda DIY sudah ada data by name by address, sehingga bisa tepat sasaran dan model penanganannya. Penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu memperhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten," jelas Huda.

Lebih lanjut, Huda mengatakan bahwa daerah-daerah dengan kantong kemiskinan ekstrem di DIY harus menjadi prioritas utama, seperti di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Huda menuturkan, pihaknya saat ini juga terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai stakeholder, termasuk Kementerian PMK. "Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai," ungkapnya. ● **pra**

JALAN SEHAT HUT KOTA BANDAR LAMPUNG

Sejumlah peserta mengikuti kegiatan gerak jalan sehat Pemerintah Kota Bandar Lampung di Jalan Kartini Bandar Lampung, Lampung, Minggu (11/6). Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut merupakan rangkaian acara dari HUT Kota Bandar Lampung yang Ke-341.



Meresahkan, Lutung Serang dan Cakar Warga hingga Luka-luka di Banyuasih

Kepala Desa (Kades) Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, Iyat mengungkapkan, bahwa warga di desanya saat ini tengah diresahkan dengan hewan jenis Lutung yang kerap muncul ke perkampungan dan menyerang warga. Dia berharap Lutung liar yang meresahkan warga bisa segera ditangani supaya tidak memakan korban lagi.

PANDEGLANG (IM)

Warga di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, diresahkan dengan kemunculan binatang Lutung yang kerap berkelirar yang menyerang warga hingga luka-luka.

Pasalnya, kemunculan Binatang lutung yang memiliki warna hitam tersebut kerap menyerang warga di wilayah itu. Bahkan, sekarang ini sudah ada dua orang yang menjadi korban dari serangan Lutung liar tersebut.

Diketahui sebelumnya, salah seorang bocah berusia 12 tahun, warga asal Banyuasih tiba-tiba diserang Lutung dan mengalami luka-luka pada bagian tubuh korban. Pada Hari Jum'at (9/6) kemarin, Lutung tersebut kembali menyerang warga yang bernama Endin (30) yang tengah melintas di jalan Gemberang, Banyuasih menggunakan sepeda motor.

Akibat dari serangan Lutung tersebut, Endin (korban-red) mengalami luka-luka, mulai di bagian kaki dan lengan terdapat luka robek.

Kepala Desa (Kades) Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, Iyat mengungkapkan, bahwa warga di desanya saat ini tengah diresahkan dengan hewan jenis Lutung yang kerap muncul ke perkampungan dan menyerang warga.

Saat ini lanjut Kades, sudah ada dua orang warganya yang menjadi korban dari serangan Lutung tersebut, hingga kedua korban mengalami luka-luka.

"Beberapa waktu lalu anak kecil usia 12 tahun alami luka-luka akibat diserang lutung. Terus Hari Jum'at kemarin, warga yang tengah mengendarai sepeda motor tiba-tiba diserang Lutung hingga mengalami luka-luka lumayan serius," ungkap Iyat

Bapenda Pandeglang Pasang Alat Pemantau Pajak di Hotel dan Restoran

PANDEGLANG (IM) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang ikuti arahan KPK RI untuk memasang tapping box di hotel dan restoran di Kabupaten Pandeglang.

Tapping box adalah sebuah alat pemantau pajak untuk menghindari penyelewengan dengan merekam setiap transaksi yang dilakukan pada setiap bisnis dijalankan oleh para pelaku usaha.

Pemasangan tapping box bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

Bapenda sudah mengusulkan pengadaan namun karena anggaran terbatas membuat hal itu tidak dapat direalisasikan di tahun 2023 ini.

Adapun saat ini Bapenda tengah mengajukan permohonan kepada bank mitra yakni kepada bank bjb Pandeglang.

Menurut Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang, Tatang Muhtasar, dalam rangka optimalisasi PAD, Kasatgag KPK RI memberi arahan agar dilakukan pemasangan tapping box.

"Arahan dari KPK langsung kami tindaklanjuti. Dengan mengajukan permohonan pengadaan mesin tapping box," katanya, Minggu (11/6).

Permohonan tapping box diajukan kepada bank mitra yakni bank bjb. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi optimalisasi pendapatan daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dan dalam upaya Pe-

ningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Restoran. Maka dengan ini kami mohon pihak Bank BJB Cabang Pandeglang dapat memfasilitasi penyiapan sarana penunjang pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang berupa sepuluh unit mesin tapping box," katanya.

Sepuluh mesin tapping box untuk dipasang di 10 restoran di wilayah Kabupaten Pandeglang. Di antaranya di Rumah Makan Dirgantara, Labbaik Chicken, Rumah Makan Dapur Ibu, Baso Hari, Baso 90, Rumah Makan Jembatan Pamatang, BWJ Tanjung Lesung, Rumah Makan Ayam Goreng PLN, Ayam Bakar Pak Raden, DM Wisata Air Persada.

"Untuk pengadaan tapping box sedang upaya permohonan ke bank bjb. Pada hari Jumat, kemarin kita sudah bersurat ke bjb, dengan harapan dapat direalisasikan," katanya.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Pandeglang Yunisa menambahkan, bahwasannya pengadaan tapping box belum dapat direalisasikan karena anggarannya kurang.

"Jadi enggak bisa direalisasikan terkecuali mengajukan permohonan kepada bank persepsi. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN atau Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak," katanya. ● **pra**

dikonfirmasi Minggu (11/6).

Pihaknya pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada sejumlah pihak, baik Polsek, Kecamatan serta pihak lainnya supaya mengevakuasi Lutung liar yang kerap mencelakai warganya.

"Kalau laporan sudah, kami harap Lutung liar yang meresahkan warga kami bisa segera ditangani supaya tidak memakan korban lagi," harpnya.

Diakuinya, Lutung yang menyerang warganya tersebut biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Jika pihak-pihak yang hendak menangkap dan mengevakuasi Lutung tersebut, waktunya harus tepat

yaitu pagi atau sore hari.

"Iya munculnya pagi atau sore hari. Warga kami saat ini sedang resah, maka kami harap pihak terkait bisa segera menangani masalah binatang liar yang meresahkan masyarakat kami," katanya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Cigeulis, Endang Mulyadi membenarkan, jika pihaknya sudah dua kali ini menangani pasien dari Banyuasih yang mengalami luka-luka akibat dari serangan hewan Lutung.

"Iya kemarin kami menerima pasien akibat serangan binatang Lutung. Sudah dua kali kami menangani pasien yang sama," ujarnya.

Lanjut dia, Petugas Sur-

vailance Puskesmas Cigeulis juga kembali melakukan PE (Pemantauan Epidemiologi) kepada pasien yang menjadi korban gigitan hewan penular rabies tersebut (Lutung liar-red). Ini kejadian yang kedua kalinya dalam sebulan ini.

"Pasien atas nama Endin (30) yang sedang mengendarai sepeda motor menggunakan celana pendek dan kaos lengan pendek, pulang ke rumah melewati jembatan Gembreg. Tidak tau asalanya darimana tiba-tiba seekor Lutung menggigit kaki sebelah kiri korban," jelasnya. ● **pra**

Jelang Idul Adha, Harga Kambing di Tangerang Naik Rp500.000

TANGERANG (IM) - Jelang Idul Adha, harga kambing di sejumlah lapak pedagang hewan kurban di Jalan Raya Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Seperti yang terpantau di salah satu lapak penjual hewan kurban milik Sarkam, harga kambing mengalami kenaikan hingga 15% per ekor. Sarkam mengatakan kenaikan harga kambing setiap tahunnya sudah biasa terjadi.

"Sekarang kambing yang biasanya Rp 2.500.000 naik menjadi Rp 3.000.000 per ekor, itu juga yang ukurannya kecil," ujarnya saat ditemui di lapak dagangannya di Jalan Raya Tigaraksa, Minggu

(11/6) pagi.

Sedangkan untuk kambing yang ukurannya besar naik dari biasanya hanya 3 juta rupiah, kini bisa dijual 3,5 per ekornya.

Naiknya harga kambing ini terjadi lantaran harga kambing di daerah pemasok seperti Garut, Jawa Barat juga naik.

"Jadi kambing ukuran kecil dan besar naik sebesar Rp 500.000 per ekor. Karena harganya naik, saya juga nggak berani stok banyak-banyak, ini hanya 50 ekor aja, biasanya sampai 100 ekor," kata Sarkam.

Sarkam mengaku, penjualan kambing kurban saat ini masih terbilang sepi, namun dia berharap semakin

mendekati hari raya Idul Adha penjualan kambing kurban miliknya bisa meningkat dari tahun sebelumnya.

"Belum keliatan penjualan, tapi mudah-mudahan bisa lebih bagus dari tahun kemarin. Terkait penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) atau virus lato-lato yang marak saat ini, mudah-mudahan aman kalau di sini," pungkasnya.

Untuk menjaga kesehatan kambing kurban yang dijualnya, dia rutin membersihkan kandang, memberi makan yang berkualitas hingga pemeriksaan kesehatan dan pemberian asupan vitamin kepada kambing kurban. ● **pp**

DPRD Apresiasi Pemkot Tangerang Gratiskan Sekolah Swasta



Turidi, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang

TANGERANG (IM) - DPRD Kota Tangerang menyambut positif atas kebijakan Pemerintah Kota Tangerang yang menggratiskan biaya pendidikan di 146 sekolah swasta. Baik tingkat SD, MI, MTS maupun SMP.

Pimpinan DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengapresiasi kebijakan Pemkot Tangerang tahun 2023 menggratiskan biaya pendidikan bagi sekolah-sekolah swasta.

Meliputi uang pangkal, SPP, ujian, ulangan dan iuran praktek layaknya di sekolah negeri.

Menurut politisi partai Gerindra ini, kebijakan Pemkot Tangerang yang menggratiskan biaya pendidikan bagi sekolah swasta adalah langkah yang perlu diapresiasi oleh masyarakat, terutama para

orang tua siswa yang anaknya bisa sekolah tanpa lagi memikirkan biaya.

D P R D K o t a Tangerang, kata Turidi, setiap tahun mensupport anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari APBD dan setiap tahun bertambah.

Pendidikan menurutnya, adalah kebutuhan mendasar, agar generasi penerus mendapatkan pendidikan yang layak, dan pemerintah sangat konsen dalam hal pendidikan.

Turidi mengungkapkan, program pendidikan gratis di Kota Tangerang sebenarnya bukan tahun ini saja dilakukan. Ia menjelaskan, DPRD bersama Pemkot Tangerang setuju menganggarkan biaya SPP dan lainnya bagi sekolah-sekolah swasta untuk mendapatkan bantuan.

"Jadi bukan hari ini saja (pendidikan gratis) sejak beberapa tahun lalu juga sudah. Bahwa SD MTS SMP swasta yang ikut program pendidikan gratis harus mendaftarkan ke pemerintah daerah," kata Turidi, Kamis (8/6).

Dengan adanya program pendidikan gratis bagi sekolah-sekolah swasta tersebut, pihaknya berharap dapat terus meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tangerang.

Oleh sebab itu, masih banyaknya minat orang yang ingin bersekolah di negeri, akan tetapi tidak semua tertampung di sekolah negeri.

Maka DPRD bersama Pemkot Tangerang sepakat dengan membuat terobosan program biaya SPP oleh pemerintah daerah alias pendidikan gratis bagi sekolah swasta.

"Ini kan sebenarnya hanya persoalan teknis, keberatan bayar SPP. Buat swasta kan lumayan, dan biasanya sekolah-sekolah swasta tersebut kadang juga kesusahannya mencari iuran itu dari siswa, maka kami DPRD Kota Tangerang bersama pemerintah sepakat membuat program pendidikan gratis," ungkapnya. ● **joh**